



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 919/II/VIII/2016

**Komisi III Akan Bentuk Pansus SP3
Pembakar Lahan**

**RUU Pengampunan Pajak Diharapkan
Percepat Pertumbuhan Ekonomi**

**Komisi V Pantau Kepastian
Pembangunan Bandara Kertajati**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Rapat Tim Kunker Komisi III DPR RI bersama Kapolda Riau

Komisi III Akan Bentuk Pansus SP3 Pembakar Lahan

Dalam pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Riau, para Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan Polda Riau yang telah mengeluarkan SP3 terkait kasus kebakaran lahan 15 perusahaan di tahun 2015 lalu. Di mana saat itu, kebakaran lahan di Riau sangat luas dan menimbulkan kabut asap. Kasus tersebut sudah menjadi isu internasional, bukan lagi isu nasional.

Komisi III DPR RI sampaikan bahwa merasa kaget ketika Polda Riau mengeluarkan SP3 terhadap kasus pembakaran hutan. Dalam pertemuan dengan jajaran Polda Riau, mengemuka usulan pembentukan Pansus oleh para Anggota Komisi III DPR RI, Selasa (02/8).

"Publik tentu bertanya-tanya kenapa Polda Riau mengeluarkan SP3, padahal kasus ini sudah membuat efek yang sangat besar bukan hanya di dalam negeri maupun luar negeri," ungkap Nasir Djamil.

"Tentu publik akan menganggap Polda Riau Gagal Paham," ungkapnya lagi

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar dibentuk Pansus Penerbitan SP3 Pembakar Lahan. "Penerbitan SP3 ini menjadi pertanyaan publik, DPR RI harus membentuk Pansus agar masalah ini terang benderang," ungkap Jazilul.

Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mendukung adanya pembentukan Pansus, karena masalah ini sudah menjadi isu nasional.

"Jika Polda Riau tidak bisa menjelaskan secara rinci proses diterbitkan SP3, maka kami minta ini harus diseriusi oleh Mabes Polri. Sanksinya tidak cukup hanya mencopot atau membebaskan orang yang bertanggung jawab, tapi kalau terbukti ada konspirasi atas penerbitan itu harus dihukum dan DPR RI akan membentuk Pansus," ungkapnya.

Lebih lanjut, Masinton sampaikan bahwa Komisi III DPR RI akan membawa masalah penerbitan SP3 dalam raker dengan Kapolri. "Kita akan bawa masalah ini dalam raker Komisi III dengan Kapolri, dan akan segera membentuk Pansus yang akan mengungkap penerbitan SP3 ini mulai dari perizinan dan sebagainya," tutupnya. ■

Ketua DPR RI Himbau Masyarakat Jaga Persatuan dan Tidak Terprovokasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Ade Komarudin meminta masyarakat khususnya masyarakat Tanjungbalai, Sumatera Utara dan sekitarnya untuk tetap menjaga persatuan dan mengedepankan sikap toleransi agar tindakan anarkis tidak terjadi lagi.

Hal ini disampaikannya merespon aksi anarkisme dan pembakaran sejumlah vihara dan klenteng di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7) malam lalu.

"Saya menghimbau semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Jika ada permasalahan, silahkan diselesaikan secara hukum dan tidak mengedepankan tindakan anarkisme," ujar Akom, Minggu (31/7).

Aksi pembakaran sejumlah rumah ibadah yang dilakukan oleh sekelompok massa tersebut, menurut Akom, telah menciderai wajah Sumatera Utara yang selama ini masyarakatnya dikenal memiliki sikap toleransi yang tinggi.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

"Masyarakat Sumut sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Sehingga kejadian ini

tidak sampai menciderai sikap toleransi yang sudah dijunjung tinggi masyarakat Sumut selama ini," paparnya.

Ketua Umum Depinas SOKSI itu juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan ketakutan di masyarakat.

Akom mengapresiasi aksi cepat kepolisian dan menghentikan aksi pembakaran rumah ibadah yang dilakukan sekelompok orang. "Kita bersyukur pihak kepolisian bergerak cepat menghentikan aksi pembakaran yang dilakukan sekelompok massa sampai akhirnya kondisi di Tanjungbalai benar-benar normal," tambahnya. ■

(*)/mp, Foto: Rami/nt

Fadli Zon Terima Penghargaan atas Dedikasi Kebudayaan dan Sosial

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendapat penghargaan dari The Royal Palace of Puri Agung Negara Djembrana, Bali. Penghargaan yang diterimanya adalah pengangkatan anggota kehormatan keluarga Puri Agung Negara, Djembrana Bali. Kehormatan ini diberikan atas dedikasinya dalam bidang kebudayaan, adat, sosial, dan kemanusiaan.

“ Saya mendapat kehormatan ikut menjadi keluarga besar. Dalam hal ini promosi di bidang budaya kemanusiaan sosial dan pariwisata,” ungkap Fadli setelah penyerahan piagam penghargaan, Senin (1/8).

Anak Agung Gde Agung B. Sutedja yang memberikan langsung penghargaan tersebut mengungkapkan, dengan pemberian penghargaan tersebut, diharapkan mampu menjalin hubungan erat antara lembaga adat dengan pemerintahan.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Anak Agung Gde Agung B. Sutedja

Sutedja yang merupakan putra pertama dari Gubernur Bali Pertama Sutedja, mengharapkan agar pemerintah memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya serta kemanusiaan.

"Kami sangat menginginkan juga menjalin hubungan erat antar sesama yang peduli dengan pelestarian budaya dan adat, peduli pada peninggalan leluhur, termasuk di sini masalah kemanusiaan," ungkapnya kepada awak media. Agung Negara merupakan lembaga adat yang peduli kepada negara dan bangsa melalui jalur-jalur budaya, kesenian dan pengetahuan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat Negara Indonesia. ■

(do) Foto: Rami/nt

Petani Miskin Bertambah, Pemerintah Harus Giatkan Perekonomian Desa

Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (1/8) merilis data tentang penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2016 sebesar 0,08 persen dibanding NTP pada bulan sebelumnya.

Menanggapi berita penurunan NTP itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), menyebut bahwa pemerintah harus memperhatikan betul penurunan nilai tukar tersebut, mengingat penurunan itu telah berlangsung sejak tahun lalu.

"Sepanjang tahun 2016, hanya sekali nilai tukar petani naik, yaitu pada bulan Mei. Itupun lebih karena dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertanian menjelang puasa. Sebelumnya, sejak

November 2015, NTP terus-menerus turun. Begitu juga yang terjadi pada bulan Juni lalu. Jadi, dalam sembilan bulan terakhir, NTP hanya sekali naik. Saya kira data ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah," ujar Fadli dalam rilisnya Selasa (2/8) di Jakarta.

Sejak Januari 2016, secara berturut-turut nilai tukar petani mengalami penurunan 0,27 persen (Januari); 0,31 persen (Februari); 0,89 persen (Maret); 0,51 persen (April); naik 0,43 persen (Mei); turun 0,08 persen (Juni); dan turun kembali 0,08 persen pada Juli lalu.

Pimpinan DPR RI ini mengatakan, data itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah karena data itu konsisten dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan yang juga dirilis BPS.

"BPS menyebut bahwa indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Ini berarti orang miskin

makin jatuh pada jurang kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan secara nasional juga meningkat dari 0,51 ke 0,52. Di desa, angkanya lebih

perekonomian global. Pemerintah harus jujur jika angka kemiskinan terus meningkat, terutama di pedesaan, di kalangan petani," tambah Fadli.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

tinggi lagi, karena indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 0,79 dari 0,67. Jadi, turunnya nilai tukar petani yang konsisten sejak akhir tahun lalu itu sebangun dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, terutama di pedesaan," imbuh Fadli.

Menyoroti naiknya jumlah orang miskin di perkotaan, terutama di DKI Jakarta, kata Fadli, merujuk pada data BPS dan Bank Indonesia, jumlah penduduk miskin di Jakarta juga meningkat sebesar 15,63 ribu, atau naik 0,14 persen, dibanding September 2015, yang tercatat 368,67 ribu orang. Artinya, baik di desa maupun di kota, kondisinya sama-sama tidak bagus."

"Dari data-data tadi, makanya saya merasa aneh jika kemudian pemerintah menyatakan jika angka kemiskinan mengalami penurunan. Data itu tidak konsisten dengan angka pertumbuhan ekonomi yang turun, turunnya harga komoditas, serta melemahnya

Sebagai Ketua Umum HKTI, Fadli memperhatikan betul naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan. "Selama ini kebijakan ekonomi pemerintah sangat bias perkotaan dan banyak mengabaikan sektor pertanian dan pedesaan. Belum lagi jika kita memperhatikan adanya jurang yang dalam antara kebijakan budi daya dengan kebijakan tata niaga di sektor pertanian. Para petani hanya disuruh berproduksi, tapi insentif yang diterimanya tidak diperhatikan. Itu sebabnya NTP terus-menerus turun," tegas Fadli.

"HKTI saat ini memiliki program untuk meningkatkan nilai tukar petani melalui program kemitraan badan usaha pangan. Kami di HKTI sedang mengembangkan program Padi Estate yang bertujuan meningkatkan produktivitas panen dan menjamin pembelian gabah kering panen (GKP) dari para petani dengan memotong rantai tata niaga GKP. HKTI tentu tidak bisa melakukan semua agenda itu sendirian, sehingga kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, BULOG, atau pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan insentif bagi para petani tadi. Bagaimanapun, usaha untuk menurunkan angka kemiskinan dengan secara signifikan menaikkan nilai tukar petani merupakan pekerjaan rumah kita semua," pungkask dia. ■

Perlu Penelusuran Isu Peredaran Narkoba di Lingkungan Penegak Hukum

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta kepada para aparat penegak hukum untuk menelusuri secara mendalam dan serius serta melakukan klarifikasi yang komprehensif terkait dengan pengakuan terpidana mati Freddy Budiman kepada Kontras.

Fadli terperanjat dengan pernyataan aktivis HAM, Haris Azhar, soal pengakuan Freddy Budiman yang mengungkap adanya keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba.

"Harus ada klarifikasi dari pihak Polri, BNN. Pihak-pihak yang terindikasikan terlibat harus diberi sanksi tegas jika terbukti terlibat. Jika tidak, sampai kapanpun narkoba tidak akan bisa diberantas," tandas Fadli di ruang kerjanya, Senin (1/8).

Menurutnya, eksekusi mati Freddy tak sekaligus menghilangkan jaringan narkoba yang ada di tanah air. Terlebih

lagi jika jaringan tersebut melibatkan TNI, Polri, bahkan BNN.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

"Kalau ini tidak diungkap, walau Freddy Budiman sudah dieksekusi tapi jaringannya tetap ada, hanya berpindah tangan saja," tegas Fadli.

Dia meminta penegak hukum bisa membuktikan pengakuan Freddy, dengan itu bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus bandar narkoba yang lebih besar. Ia juga meminta agar Kejaksaan Agung membeberkan alasan kepada publik, kenapa hanya empat dari 14 terpidana mati yang dieksekusi.

"Pihak Kejaksaan aneh melakukan pilihan eksekusi ini, sebenarnya ada latar belakang apa, harus ada penjelasan," katanya. ■

(ekamp), Foto: Andri/jk

Dekorasi Bunga Akan Hiasi Gedung Nusantara DPR RI Sambut HUT RI-71

Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71 Sekretariat Jenderal DPR RI akan mendekorasi Gedung Nusantara dengan hiasan bunga lokal. Bunga dengan warna merah dan putih akan mendominasi dekorasi gedung.

Sedangkan dinding Ruang Rapat Paripurna yang akan digunakan untuk Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2016 akan dihiasi dengan bunga yang membentuk seluruh kepulauan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencananya juga dua kolam depan yang ada di bawah Gedung Nusantara akan dihiasi dengan bunga teratai. "Dihiasi banyak bunga-bunga, ada bunga sedap malam ada tanaman kastubah, mawar, semuanya bunga lokal," jelas Sekjen DPR RI



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Sekjen DPR RI meninjau persiapan acara HUT Kemerdekaan

Winantuningtyas Titi Swasanany saat mendampingi Ketua DPR RI Ade

Komarudin Meninjau gedung DPR RI dalam rangka persiapan Pidato

Kenegaraan, Jumat (29/7).

Win sapaan akrab Sekjen DPR RI menegaskan, acara peringatan kemerdekaan di DPR RI akan berlangsung sederhana, namun akan disetting secara meriah. Kesederhanaan itu tercermin dengan menggunakan produk dalam negeri.

"Kita rancang hiasannya yang mencerminkan daerah, kemudian kita menggunakan produk dalam negeri semuanya. Semua tanaman bunga-

bunga kita optimalkan dari yang ada di dalam negeri," jelas Win. ■

(ekamp), Foto: Jayadi, Rumi/mr

RUU Pengampunan Pajak Diharapkan Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Fungsi legislasi telah dijalankan oleh DPR selama Masa Sidang V. DPR bersama dengan Pemerintah telah menghasilkan beberapa RUU. Yang pertama, RUU tentang Pengampunan Pajak. Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi harta.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat membacakan Pidato Penutupan Masa Sidang, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (F-PD), didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (F-Gerindra), Taufik Kurniawan (F-PAN) dan Fahri Hamzah (F-PKS).

Hal ini antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, dan yang juga penting dapat mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," jelas orang nomor 1 di DPR RI itu.

Akom, panggilan akrab Ade menambahkan, DPR RI bersama Pemerintah juga telah mengesahkan RUU tentang Paten. Substansi penting dalam RUU ini, antara lain terkait lingkup perlindungan paten, subjek paten, pemakai terdahulu dan invensi yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

"Selain itu juga terdiri dari substansi terkait komisi banding paten, pelaksanaan paten oleh Pemerintah, penghapusan paten, kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, dan adanya ketentuan pidana bagi pelanggar paten. DPR RI berharap, semoga RUU ini dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan kita semua," harap Akom.

Politisi F-PG itu menyatakan, RUU berikutnya yang diselesaikan adalah RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Beberapa penyempurnaan telah dimasukkan dalam RUU ini.

Penyempurnaan itu antara lain mengenai persyaratan, pengaturan terkait pelaksanaan, penegasan tentang pemaknaan nomenklatur Petahana, pendanaan, penyederhanaan penyelesaian sengketa, penetapan waktu pemungutan suara, mengenai pelantikan serentak, sanksi yang jelas bagi yang melakukan *money politic*, hingga dan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan.

"Selain itu, RUU ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan. Diharapkan dengan adanya penyempurnaan RUU ini, hajat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik," harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara terkait dengan RUU tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Akom memastikan RUU ini telah selesai dibahas di DPR RI.

"Namun, mengingat Perppu ini diterima DPR RI pada Masa Sidang ini maka sesuai dengan ketentuan, persetujuan DPR RI akan dilakukan pada masa persidangan berikutnya," pasti Akom.

Selain itu, imbuh Akom, DPR RI juga



Ketua DPR RI Ade Komarudin

telah menyetujui RUU Usul Inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi RUU DPR RI, yang akan ditindaklanjuti.

DPR RI bersama Pemerintah juga telah menyepakati 10 RUU Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. Akom menambahkan, DPR RI juga telah mengesahkan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Selanjutnya, DPR RI saat ini sedang melakukan penyusunan 15 RUU dan melanjutkan pembahasan 20 RUU yang menjadi prioritas bersama dengan Pemerintah.

"Sementara, RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi 2 RUU, sedangkan RUU yang saat ini masih menunggu Surat Presiden 1 RUU dan terdapat 7 RUU Ratifikasi yang masih dalam proses pembahasan komisi-komisi," ujar Akom. ■

DPR RI Prihatin Atas Kondisi Sekolah di Kupang

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya merasa prihatin melihat kondisi Sekolah Dasar (SD) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di sela-sela kunjungan ke SD Inpres Bakunase, Kota Kupang, Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra yang turut serta dalam Tim Komisi X ke NTT tersebut

inpres Bakunase sudah berusia 74 tahun namun ruang belajar kurang, laboratorium tidak ada, perpustakaan yang ada kondisinya memprihatinkan.

"Usulan-usulan dan aspirasi dari

Namun, lanjutnya, hal ini tidak terlepas dari perjuangan Anggota Komisi X DPR RI daerah pemilihan NTT yaitu Jefirston Riwu Kore dan Ferry Kase.

"Kita akan dorong kedua pejuang pendidikan dan kebudayaan dari NTT ini agar terus memberikan bantuan-bantuan ke sekolah ini maupun kepada anak-anak melalui beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)", terang Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi ini.

PIP adalah salah satu upaya dalam membantu orangtua terhadap biaya sekolah anak didik. Dan ini merupakan dana APBN yang bisa langsung dicairkan kepada siswa melalui bank-bank pelaksana.

Sutan mengharapkan kepada *stake holder* pendidikan, bantuan ini jangan dihalang-halangi. "Karena ini adalah hak dari anak-anak sekolah kita agar pendidikan mereka ke depan berkualitas", pungkasnya.

Agenda Kunjungan Tim Komisi X pada hari kedua kunjungannya ke NTT adalah mengunjungi SD Inpres Bakunase, SD Nefosaka Futukou dan SMA 12 Kupang, serta melakukan pertemuan dengan civitas akademika Universitas Nusa Cendana Kupang. ■

(ed) Foto: Susi/fk



Tim Kunker Komisi X DPR RI kunjungi SD Inpres Bakunase 1 Kupang, NTT

menyatakan keprihatinannya.

"SD Inpres Bakunase sungguh memprihatinkan, karena sekolah ini berada di tengah kota," kata Sutan, Senin (1/8)

Ia menyampaikan, bahwa menurut informasi dari Kepala Sekolah SD Inpres Bakunase, pada hari ini SD

Kepala Sekolah, kita langsung minta kepada Direktur Pendidikan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendampingi kunjungan ini. Insya Allah di 2017 akan langsung direalisasikan dan hari jadi SD Inpres Bakunase ke 74 hari ini membawa berkah yang luar biasa", papar politisi dari Gerindra ini.

BUMN di Malut Belum Maksimal Sejahterakan Rakyat

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Maluku Utara (Malut) belum maksimal memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Koordinasi dan sinergi masih jadi masalah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Nur Hasan Zaidi usai mengikuti pertemuan dengan sejumlah BUMN di Ternate, Malut, Selasa (2/8). Padahal, kekayaan alam dan pariwisata di Malut sangat potensial.

"Kata kuncinya sinergi dan koordinasi antara BUMN, Pemda, dan



Anggota Komisi VI DPR RI Nur Hasan Zaidi

kementerian terkait belum berjalan. Mestinya antara pelayanan dan bisnis bisa berjalan beriringan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa membaik. Sinergi dan koordinasi masih jadi barang mahal," ujar politisi PKS ini.

Ditambahkan, Nur Hasan, investasi jangka panjang di Malut harus pula diperhatikan oleh sejumlah BUMN. Investasi yang panjang tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. "Kementerian BUMN harus mengarahkan investasi jangka panjang.

Apalagi, di Malut ada 'sepenggal surga', yaitu kekayaan alam dan pariwisata."

Pada bagian lain, dia juga menyoroti soal kesiapan SDM di Malut. Bila SDM bagus, lanjutnya, pengelolaan BUMN dan pemerintahan juga membaik. Untuk itu, program CSR BUMN bisa pula diarahkan untuk pemberdayaan SDM di Malut.

Nur Hasan mengingatkan tentang faktor historis Malut yang sangat panjang. Sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan,

dan Jailolo. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamarikan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiannya pada NKRI.

Bahkan, kesultanan di Malut telah memberi sumbangsih terbaiknya bagi Indonesia. Namun, ketika Malut telah ditetapkan sebagai provinsi baru sejak 1999, pemerintah pusat kerap memberi harapan kesejahteraan dan kemajuan bagi Pemprov Malut dan rakyatnya. Ternyata, harapan itu tak banyak direalisasikan, terutama oleh Pemerintahan Jokowi saat ini. ■

(mb) Foto: Hiacen/mr

Komisi III Bahas Narkoba dan Tumpang Tindih HGU di Kalsel

Tim Kunker Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kapolda Kalimantan Selatan dan Kepala BNNP Kalsel, yang bertempat di Mapolda Kalimantan Selatan, Senin, (01/8). Dalam pertemuan itu, para Anggota Dewan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh kedua institusi tersebut, yakni tentang maraknya peredaran narkoba.

Peredaran narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong tinggi, bahkan salah satu Anggota Komisi III bisa mengidentifikasi tempat-tempat dimana orang bisa mendapatkan narkoba ini dengan bebasnya," ujar Anggota Komisi III Erma Suryani Ranik.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan, Polda Kalsel harus bekerja lebih keras lagi dalam melakukan pemberantasan narkoba, sebab Dewan melihat ada indikasi kurang kuatnya kerjasama antara BNN Provinsi dengan Polda Kalsel dalam hal pemberantasan narkoba.

"Saya menghimbau agar hal ini tidak terus dibiarkan, dan jangan sampai terjadi saling tunggu antar institusi, seharusnya antara institusi itu saling menguatkan. Jangan ada kesan terjadi persaingan, karena masalah narkoba merupakan musuh bersama. Oleh karenanya jangan dijadikan ajang saingan antar institusi," katanya.

Pada kesempatan itu, Komisi III juga mengingatkan kepada Kapolda Kalsel dan jajarannya, tentang banyaknya masalah tumpang tindih lahan Hak

Guna Usaha (HGU) yang terjadi di wilayah Provinsi Kalsel. Meskipun hal ini bukan kesalahan dari pihak Kepolisian, namun pada akhirnya polri juga yang akan menjadi pemadam kebakaran dalam masalah tersebut. Sebab kalau sudah terjadi konflik antar masyarakat atau perusahaan, yang diminta untuk terjun ke lapangan adalah Polri. Hal ini akan menambah beban kerja yang sesungguhnya tidak perlu.

"Saya secara pribadi menghimbau agar Kapolda bisa duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi untuk mencari solusi atas persoalan tata ruang ini. Karena kalau dibiarkan, saya khawatir bisa menimbulkan konflik horizontal," tutur Erma.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak izin kembar HGU yang terjadi di Kalsel, baik itu perusahaan perkebunan kelapa sawit, lalu di

atasnya ada izin tambang, dan di sebelahnya lalu ada HGU perkebunan. Hal ini harus dibereskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru, harus memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tumpang tindih HGU di Kalsel ini," pungkasnya. ■

(dep.m) Foto: Ryan/fk



Anggota Komisi III Erma Suryani Ranik

Komisi IV DPR RI Dukung Provinsi Maluku Utara Jadi Lumbung Ikan Nasional

Impian, harapan dan perjuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara menjadikannya sebagai lumbung ikan nasional mulai membuah hasil. Pasalnya Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Daniel Johan dan didampingi 17 orang anggota dewan memberikan dukungan penuh usai melihat presentasi Kepala DKP tentang potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Maluku Utara, Selasa (2/8).

“Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensial perikanan yang begitu kaya. Sangat mungkin bisa dijadikan sebagai lumbung ikan nasional,” ujar Djohan saat meninjau Pelabuhan Perikanan Bastilong, Maluku Utara.

Politisi Senayan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Partai Kebangkitan Bangsa, mengungkapkan bahwa Maluku Utara bisa menjadi "Lumbung Ikan Nasional" salah satunya adalah luas lautnya yang lebih besar daripada daratan. Kondisi ini berdampak pada potensi perikanan yang melimpah. Menurutnya, potensi perikanan dan kelautan Maluku Utara sudah mendukung secara alamiah. Tinggal Pemerintah Pusat maupun Daerah, menyiapkan segala pendukung infrastruktur.

"Jadi untuk lumbung ikan harus ada dukungan masyarakat terlebih dahulu. Setelah itu dari kalangan DPR RI. Untuk DPR RI, sudah pasti laut Maluku Utara cukup luas," ujar Daniel menambahkan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa mengungkapkan, kebijakan pemerintah menjadikan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan nasional (LIN) harus menjadi kepentingan bersama. Bukan saja Maluku Utara, tapi juga nasional.

"Untuk nasional berkepentingan memperkuat sentra-sentra yang menjadi unggulan perikanan dan kelautan di Seluruh Indonesia. Sementara kesiapan infrastrukturnya harus pula didukung adanya program," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV mengakui, permasalahan sangat minimnya infrastruktur juga masih terjadi di sebagian daerah di Jawa. "Tentu ini berkaitan dengan kebijakan anggaran karena APBN kita tidak cukup untuk seluruh kebutuhan yang ada di daerah," katanya.

Dia juga menjelaskan, yang paling

terpenting adalah Pemerintah Provinsi Maluku dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi perikanan dan kelautan menjadi industri. "Jadi nilai tambah itu adanya di industri, sehingga kita akan dorong industri perikanan, yang salah

negeri. Sejauh ini sudah banyak negara yang melakukan penawaran untuk membangun industri, namun masih dikaji pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Buyung Radjiloen mengatakan, Maluku Utara dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakat. "Kita sudah sampaikan strategi untuk membangun tiga *cluster* di Tobelo, Ternate dan Bacan. Ini bisa dikatakan tol lautnya perikanan, karena kita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada." Ungkapnya.



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Pelabuhan Perikanan Bastilong, Maluku Utara

satunya di Morotai," sambung Daniel.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Prabowo se usai pertemuan, mengakui Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perikanan cukup besar, mulai dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Selain harus dilindungi, potensi ini juga perlu ditingkatkan lagi.

Nilanto menegaskan, laut Maluku Utara kedepan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang asing, baik dari sisi modalnya, maupun kapal asing. "Sehingga masyarakat Maluku Utara dapat memanfaatkan laut sebaik mungkin untuk menghasilkan ikan kemudian ditimbang dan dapat menghasilkan uang," jelasnya.

Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dalam tiga tahun mendatang pemerintah akan membangun industri perikanan dan kelautan dengan menggandeng investor luar

rencana strategis ini dipacu untuk menuju Maluku Utara Lumbung Ikan Nasional 2019. "Untuk sementara Tobelo, Halmahera Utara, akan dibangun pusat pengembangan industri perikanan untuk menampung hasil tangkapan ikan dari Morotai, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah yang dapat dilalui jalur darat," paparnya.

"Kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku Utara tidak mengharapkan anggaran yang sangat besar dari pemerintah pusat. Yang diutamakan adalah kebijakan pemerintah pusat yang dapat merangsang pertumbuhan investasi di sektor perikanan Maluku Utara. Disisi lain, kelemahan kita di beberapa sektor seperti listrik PLN yang belum naik status dari cabang menjadi wilayah serta untuk meningkatkan suplai listrik di daerah. Kami sangat kesulitan menyediakan listrik dengan kapasitas diatas 200 kilowatt dan harus berurusan ke Ambon, ini yang menjadi persoalan," tandasnya. ■

PIA DPR RI Gelar Halal Bihalal

Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI Periode 2014-2019 menggelar Halalbihalal di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (2/8).

Halalbihalal diselenggarakan untuk bersilaturahmi sesama anggota PIA usai lebaran Idul Fitri 1437 H. Ketua PIA Netty Ade Komarudin mengharapkan dengan adanya pertemuan ini bisa menjaga komunikasi dengan baik dan bisa terus menjaga hubungan silaturahmi ke depannya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua PIA Grace Fadli Zon

menyampaikan harapan agar halalbihalal ini bisa menjadi jalinan antar anggota PIA lebih solid, lebih dekat dan lebih kuat. "Itu yang terpenting sehingga PIA bisa lebih semangat untuk melakukan kegiatan-



Ketua PIA DPR RI Netty Ade Komarudin dan sejumlah Anggota PIA menyelenggarakan HBH

kegiatan sosial," jelasnya.

Ketua Panitia dan juga Istri dari Ketua Umum Partai Golkar Deisti Novanto menyampaikan "Minal Aidzin Wal Faidzin" mohon maaf lahir batin. Partai

Golkar selaku penyelenggara Halalbihalal ini dimaksudkan untuk mempertemukan seluruh anggota PIA usai bulan Ramadhan.

Adapun rangkaian kegiatan halal bihalal diisi antara lain ceramah dan sambutan Ketua PIA. Dalam ceramah dengan tema "Menjaga Tali Persaudaraan" oleh ustadz Abu Zaidan Agus Hendra Gunawan antara lain ditekankan, menjaga persaudaraan bisa dilakukan dengan menyebarkanlah islam dan saling mendoakan sesama

teman.

"Jadilah teman-teman yang baik dan sholehah, mencintai saudaranya karena Allah serta menjauhi sifat buruk kepada saudaranya," ujarnya. ■

(riimp) Foto: Rani/fk

Komisi IV Dukung Perbaikan Infrastruktur PPS Lampulo, Aceh

Komisi IV DPR RI mendukung Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, Banda Aceh untuk memperbaiki infrastrukturnya.

“ Kami cukup mengapresiasi perubahan status pelabuhan ini dari PPI (Pangkalan pendaratan ikan) ke pelabuhan perikanan pantai dan sekarang menjadi pelabuhan perikanan samudera.

Namun semua itu seharusnya dibarengi dengan berbagai perbaikan, salah satunya di bidang infrastruktur,"ungkap Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo saat meninjau PPS Lampulo, Banda Aceh, Selasa (2/8).

Dari perbincangan Edhy Prabowo yang didampingi Tim kunjungan

kerja Komisi IV DPR RI lainnya yang terdiri dari AA Bagus Adhi Mahendra putra, Darori Wonodipuro, Oo Sutisna, Hermanto, dan Hamdani dengan para nelayan, dihimpun beberapa masukan terkait infrastruktur.

Diantaranya penambahan pemecah ombak, penambahan tempat pengelolaan ikan, serta yang tidak kalah pentingnya peningkatan kualitas IT di sekitar PPS. IT sangat penting untuk mengetahui kondisi yang terjadi di laut Aceh. Termasuk kemungkinan masuknya nelayan asing ke perairan Indonesia, khususnya di laut Aceh.

Atas dasar itulah, lanjut Edhy pihaknya akan mendukung penuh perbaikan dan peningkatan infrastruktur di PPS Lampulo, Banda Aceh. ■

(Ayo) Foto: Jywantr



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

Hutan Tersisa 13%, Konservasi Kawasan Hutan Jabar Mendesak

Jawa Barat termasuk kawasan paling kritis di Indonesia karena luas hutan yang tersisa hanya 13%, jauh dari standar minimal yang ditetapkan pemerintah yaitu luas minimal 30% dari luas wilayah. Hal tersebut menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Hak Guna Usaha (HGU) dan Alih Fungsi Kawasan Hutan ke Perkebunan Cikole Lembang, Bandung baru-baru ini.

Politisi Gerindra ini menyarankan untuk mencapai target tersebut Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bisa memaksimalkan lahan-lahan pekarangan dan kebun masyarakat. Jawa Barat itu luas tapi banyak lahannya dimiliki oleh perorangan masyarakat kaya dari Kota bahkan luar Jawa Barat. Di sini diharapkan Pemda setempat membuat aturan bagi masyarakat yang tidak mengelola tanahnya (membiarkan tidak diurus bertahun-tahun) dicabut saja kepemilikannya lalu diserahkan ke Pemda (negara) agar bisa dimanfaatkan sebagai lahan konservasi atau sebagai lahan terbuka hijau.

"Untuk memenuhi target 30% lahan hijau, Pemda perlu mendata secara rinci ada berapa luas lahan tidur, lahan kosong yang mencapai ribuan hektar di Jawa Barat yang bisa ditanami, apa alasan pemilik tidak mengelola lahan mereka, kasih batas waktu lalu perlukah pemerintah intervensi dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan sistem bagi hasil atau kerja sama. Lucunya jika ada lahan terbengkalai tapi tidak mau dikelola, yang begini sebaiknya cabut saja hak kepemilikannya," tegas Edhy.

Komisi IV melihat pemerintah sepertinya masih menganggap kurang begitu penting masalah konservasi hutan, dilihat dari kebijakan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang harus mencari sendiri sumber pendanaan untuk menghidupi kementeriannya. KLHK menghimpun PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) setiap tahunnya yang mencapai 5 triliun, sementara total anggaran yang diterima KLHK hanya 6,1 triliun yang sebagian besar pengembalian dari PNB tadi.

"Artinya inilah yang kami lihat pemerintah nya yang belum serius bukan



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

KLHKnya karena mereka tergantung kebijakan pemerintah, kesolidan KLHK seharusnya diberikan kepercayaan mengelola anggaran lebih besar lagi, bagaimana juga penyerapannya, arah peruntukannya sesuai dengan tujuan," imbuh Edhy.

Ironisnya, menurut politisi Dapil Sumsel I ini dari berbagi sumber rata-rata nilai kerugian akibat kebakaran hutan kita pada tahun 2015 lalu mencapai 200 triliun, belum termasuk dampak banyaknya masyarakat yang tidak bisa bekerja akibat kebakaran hutan itu. Dengan luas hutan mencapai 120 juta hektar dengan alokasi anggaran 6,1 triliun maka tiap hektar hutan hanya 50 ribu rupiah alokasinya per tahun. Dengan kunjungan ini kami berharap memantapkan langkah kami dalam rangka mengawasi pengelolaan kawasan hutan ke depan.

Di lain pihak, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang mengemukakan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah memiliki Perda Kawasan Perlindungan yang memutuskan 45% kawasan Jawa Barat ini sebagai kawasan perlindungan. Itu artinya mereka memastikan bahwa persoalan air itu nomor satu. Yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sehingga daerah-daerah *up land* di Jawa Barat sering berkompetisi dengan kepentingan rakyatnya.

"Dari pengamatan KLHK di Jawa Barat terjadi penurunan praktik perambahan hutan

oleh masyarakat sekitar, karena Jawa Barat dikuasai oleh Perum Perhutani dengan menjalankan program-program kerakyatannya yang disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Saya menghimbau pemda segera menindaklanjuti UU Konservasi Tanah dan Air yang dihasilkan oleh Komisi IV sejak tahun 2014 segera diimplementasikan," papar San Afri Awang.

Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Budi Susatijo menjelaskan bahwa Pemprov Jabar memiliki program Citarum Bestari (Bersih Indah dan Lestari) dalam rangka perbaikan lingkungan dari hulu sampai hilir dan melibatkan semua pihak, BUMN, Pemkab/Pemkot, Pemerintah pusat dan provinsi yang bersinergi membangun kawasan yang lebih kondusif dari aspek lingkungan.

"Sungai Citarum merupakan sungai yang terpanjang dan terbesar di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Sungai yang mengalir sepanjang 297 km ini membentang dari hulunya di Situ Cisanti yang teletak di kaki Gunung Wayang sebelah selatan Kota Bandung, bermuara di Pantai Utara Pulau Jawa tepatnya di Muara Gembong Kabupaten Bekasi," jelasnya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perum Perhutani, Teguh Hadi Siswanto memaparkan bahwa di Bandung Selatan Perhutani melakukan pendekatan ke masyarakat agar bisa mengembalikan kembali fungsi lahan atau hutan yang sempat terambah ke asalnya. Atau dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman kopi. Bagaimana kita menekan praktik perambahan hutan dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut membantu menjaga dan mengelola hutan secara arif," pungkas Teguh. ■

(eddyfata: afjti)

Komisi X DPR RI: Taman Ziarah Oebelo Minim Fasilitas Umum

Anggota Komisi X DPR RI menilai Taman Doa dan Ziarah Bunda Maria di Oebelo, Kupang masih minim fasilitas umum.

Penilaian tersebut disampaikan saat Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya meninjau taman tersebut.

"Setelah kawasan ini dibuka sebagai taman doa, yang penting sarana dan prasarananya ditingkatkan", kata Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana di Kupang, Minggu (31/7).

Menurut Meli demikian sapaan akrabnya, saat ini baru fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan yang ada di Taman Doa Bunda Maria ini, fasilitas umum lainnya masih minim, bahkan toilet saja masih kurang, toilet yang adapun tidak ada airnya.

"Kalau sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana ini akan menjadi tujuan wisata bagi umat katolik agar tidak perlu jauh-jauh ke Romawi", ujar polisi dari Gerindra ini.

Ia berjanji akan membicarakan taman ini dengan Kementerian Pariwisata, walaupun belum menjadi destinasi yang diunggulkan, tapi menurutnya ini menjadi cikal bakal untuk destinasi wisata religi.

"Kami berharap pelan-pelan ada

pendanaan ke wisata religi khususnya taman doa Oebelo ini. Karena tinggal sedikit saja untuk mendorong. Kawasan sudah terbuka, jalannya bagus, tinggal sarana prasarana penunjang kegiatan beragama untuk ditingkatkan," mantapnya.

Sementara rekan satu fraksi dengan Meli, Dwita Ria Gunadi menyatakan kurang setuju terkait rencana akan dibangunnya penginapan bagi pengunjung di kawasan seluas 5 hektar tersebut. Menurutnya hal tersebut akan mengganggu kesakralan tempat beribadah bagi umat Katolik tersebut.

"Kalau tempat ini nantinya ada penginapan, itu memang disatu pihak tujuan kita tercapai, tapi kita harus menjaga kebersihan dan kesakralan tempat ini akan berkurang," papar politisi Daerah Pemilihan Lampung ini.

Ia menyatakan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mempromosikan taman doa ini untuk menarik banyak wisatawan, karena ini satu-satunya taman wisata religi yang cukup luas di Indonesia.

"Kami, Komisi X DPR RI akan memperkenalkan kepada saudara-saudara kita baik Katolik maupun yang berbeda agama.



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Taman Ziarah Oebelo di Kupang

Disinilah keragaman dan kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersamasama bertoleransi. Kita nikmati taman doa ini bersama karena bukan hanya untuk kegiatan religi saja tapi juga untuk berwisata," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Alam pengelola dan penanggungjawab taman doa Oebeleo, menjelaskan Taman Ziarah dan Doa Bunda Maria seluas 5 hektar dibangun pada 2013 oleh Keuskupan Kupang. Dimana pembangunannya berasal dari dana swadaya umat Katolik di Keuskupan Kupang.

Tempat Ziarah dan Doa ini, lanjut Alam, bukan hanya sebagai tempat doa bagi umat Katolik. Tapi tempat ini terbuka bagi semua umat.

"Sejak dibuka lebih banyak umat yang datang bukan Katolik yang berkunjung, banyak umat lain yang datang. Mereka lebih memanfaatkannya untuk wisata," terangnya. ■

(sc) Foto: Suci/hr

Tol Laut di Maluku Tidak Efektif

Kebijakan tol laut di wilayah Maluku Utara (Malut) tidak efektif. Armada kapal yang sangat minim, tidak bisa melayani semua pelabuhan yang ada di sini. Akibatnya, distribusi logistik pun tidak maksimal.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal tersebut di Ternate, Malut, Selasa (2/8). "Apa yang diinginkan pemerintah dengan tol laut, penetrasinya ke Malut sangat minim. Dengan armada Caraka 3 yang hanya berkecepatan 7 knot tidak mungkin sampai ke empat pelabuhan di Malut secara maksimal sesuai ron trip yang diharapkan."

Untuk memaksimalkan tol laut, mestinya infrastruktur ditingkatkan agar distribusi logistik lancar dan tidak

membebani anggaran negara. Selain itu ada sekitar 14 ribu armada swasta yang bisa diberdayakan kembali dengan memberi subsidi. "Ini bisa bantu mengangkut logistik di wilayah Malut," kata Bambang.

Selama pemerintah, sambung politisi Gerindra ini, masih mengandalkan kapal milik pemerintah sendiri, ketersediaan logistik bagi masyarakat tak terpenuhi secara maksimal dengan harga murah. Pemberdayaan kapal swasta sekali lagi bisa mempercepat dan pemeratakan distribusi logistik.



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

Menurut Bambang, praktis dari empat pelabuhan di Malut tidak bisa terlayani dengan baik, karena kapasitas kapal pemerintah, yaitu Caraka 3 hanya 90 teus. Padahal, satu pelabuhan butuh kapal setidaknya 80 teus. Itu berarti tiga pelabuhan lainnya tak terlayani. ■

(mb)foto: Husain/mr.

Komisi VI Usulkan Bentuk Panja PTPN

Anggota Komisi VI DPR RI Mustafa Assegaf mengusulkan agar dibentuk Panja PTPN untuk menindaklanjuti temuan yang diperoleh saat kunjungan kerja ke PT Perkebunan Nusantara VI Provinsi Jambi pada Selasa, (02/8). Beberapa temuan yang didapat adalah mengenai realisasi kinerja perusahaan dari aspek finansial yang menurun drastis di tahun 2015.

“ Saya usul agar Komisi VI dapat membentuk Panja PTPN di masa sidang berikutnya untuk menindaklanjuti kinerja PTPN,” tutur Mustafa.

Sebelumnya, Komisi VI menemukan adanya kinerja perusahaan PTPN VI yang menurun secara drastis. Seperti kinerja keuangan yang merosot dari Rp 115 Miliar menjadi Rp 1.9 miliar untuk laba tahun berjalan.

Nantinya, Panja PTPN ini akan mendalami kinerja PTPN. Namun, beberapa legislator masih dalam proses pendalaman terkait Panja yang akan dibentuk nantinya dilakukan secara terpisah atau tidak. Seperti contoh Panja PTPN



Suasana pertemuan Kunker Komisi VI DPR RI dengan PT Perkebunan Nusantara VI di Jambi

yang khusus mengelola sawit dan PTPN yang khusus mengelola ternak.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI, Farid Al Fauzi mengatakan, temuannya ini akan ditindaklanjuti dalam rapat yang akan dilakukan Komisi VI saat memasuki masa persidangan mendatang.

Ia berharap dapat terus menampung masukan dari masyarakat untuk diperjuangkan di pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, PTPN adalah perusahaan-perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia. Kebanyakan

perkebunan-perkebunan ini adalah perkebunan peninggalan dari Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga pengelolaannya betul-betul harus diperhatikan agar sesuai dengan tujuan dari BUMN untuk meningkatkan pendapatan negara. ■

(b.smp) Foto: Hendra/hr

Lapas Kelas II A Pekanbaru Terpadat di Indonesia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman memimpin langsung kunjungan lapangan ke Lapas IIA Pekanbaru dan menggelar pertemuan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Senin (1/8).

Tim Komisi III DPR RI melakukan sidak dengan melihat langsung satu persatu ruangan sel yang dihuni oleh para narapidana dan juga menyempatkan diri berdialog dengan seorang narapidana kasus narkoba yang mendapat vonis hukuman mati. Dalam sidak tersebut, Komisi III DPR RI menemukan 9 orang narapidana yang telah di vonis hukuman mati.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman sampaikan bahwa Komisi

III DPR RI menemukan permasalahan yang hampir sama disemua Lapas di Indonesia, yakni permasalahan *over* kapasitas.

Benny tegaskan bahwa Komisi III telah berkali-kali memberikan kritikan kepada pemerintah agar mengambil langkah definitif terkait permasalahan *over* kapasitas diseluruh Lapas di Indonesia. Kenyataannya bahwa semakin banyak bertambah penghuni lapas, dan tidak diimbangi dengan mereka yang keluar.

"Solusi kepada Pemerintah adalah

menambah ruangan baru didalam lapas atau dengan membangun lapas baru yang lebih memadai, selanjutnya adalah, Pemerintah melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi.

Lebih lanjut, Benny sampaikan bahwa Lapas IIA Pekanbaru merupakan Lapas yang paling padat di Indonesia. Dimana dalam sidak tersebut terlihat bahwa napi berhimpit-himpitan di ruangan yang sangat kecil. Sehingga napi dengan kasus khusus dan umum digabungkan, selain itu

Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jangan Terlalu Dipaksakan

Pemerintah perlu mengkaji kembali pelaksanaan Kurikulum 2013 terutama di wilayah Timur. Sebaiknya jangan terlalu "dipaksakan" karena masih banyak masalah terutama sarana dan prasarana penunjang yang belum ada.

“Yang paling esensial saja, seperti buku-buku Kurikulum 2013 yang seyogyanya 18 Juli sudah sampai, tetapi setelah satu semester berjalan bukunya baru tiba. Pemerintah Pusat harus hati-hati dalam menerapkan kebijakan ini, tidak semua Provinsi sudah siap dalam penerapannya,” kata Wakil Ketua

Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memimpin Tim Kunker Komisi X meninjau SMP, SMK, SMA Negeri unggulan di Maluku, Sabtu (30/7).



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah didampingi Kepala Sekolah SMAN Siwalima di Maluku

Ditambahkannya, sarana penunjang untuk Kurikulum 2013 seperti penambahan Ruang Kelas, Laboratorium, dan Perpustakaan dalam pantauan kami belum

dibangun oleh pemerintah, tetapi Kurikulumnya justru sudah berjalan.

"Belum lagi kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum ini, banyak guru di Maluku mengeluh karena harus mengajar dalam waktu yang lama, sehingga ada guru yang mesti mengajar di tempat lain untuk memenuhi standar waktu yang ditetapkan. Saya mengusulkan agar Kurikulum ini bisa serentak dimulai pada tahun ajaran 2018-2019," ujar Politisi F-Golkar ini.

Mengenai Ujian Nasional, lanjut Ferdiansyah, kalau tertulis relatif tidak ada masalah, walaupun ada cetakan yang rusak, namun secara persentase tidak sampai 2 persen, begitu juga dengan distribusi soal berjalan baik.

"Yang menjadi masalah disini Ujian Nasional berbasis *online*, saya sarankan lebih baik semi *online*, karena kalau *online* secara utuh, ketersediaan fasilitas seperti komputer harus dipenuhi, belum lagi frekuensi jaringan internet mesti dijamin tidak terganggu. Untuk wilayah Timur seperti Maluku, belum bisa melaksanakan ujian *online* karena sarannya tidak mendukung," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, Kemendikbud sudah menyatakan pelaksanaan Kurikulum 2013 akan dievaluasi, karena tidak semua sekolah dapat menjalankan. Siswa di Maluku juga banyak mengeluhkan karena belum ada sarana dan prasarana penunjang.

"Siswa merasa tidak bisa melakukan banyak hal karena tidak banyak dibantu langsung oleh guru, memang kurikulumnya seperti itu. Tetapi karena sarannya juga belum ada, jadi siswa di Maluku bingung harus melakukan apa," ungkap Politisi F-PKS itu.

Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Semi mengatakan, sebagai contoh SMP 14 Negeri Maluku. Putusan MK menyatakan SMP ini menjadi sekolah bertaraf Internasional, namun karena masalah sarana dan fiskal keuangan daerah provinsi belum memadai, kami meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Sehingga saat ini, Ujian Nasional berbasis komputer belum bisa dijalankan di sekolah yang ada di Maluku. ■



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman berdialog dengan sejumlah Narapidana

Lapas IIA tidak menerima napi titipan. Benny ungkapkan, dari hasil pertemuan dengan Kanwil KemenkumHAM Riau dan Lapas

rehabilitasi bukan di Lapas sehingga Lapas tidak kepenuhan kapasitas. ■

Kelas IIA Riau, mereka mengusulkan agar napi yang terkena sanksi dibawah satu tahun tidak ditahan namun hanya wajib lapor dan untuk napi pengguna narkoba ditempatkan di panti

(skr.rpi) Foto: Singgih/mr

(jaka) Foto: Jakarta

Komisi V Tinjau Pelabuhan Belang-belang Sulbar

Setelah mendarat di Bandara Tamba Padang, Tim Komisi V DPR RI melanjutkan kunjungannya ke Pelabuhan Belang-Belang, Sulawesi Barat dalam rangka Ekspose Otoritas Pelabuhan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, Senin (1/8).

Hal ini merupakan salah satu acara kunjungan kerja masa reses Tim Komisi V dipimpin Wakil Ketua Muhidin Mohammad Said, guna melihat langsung kondisi Pelabuhan yang masih perlu banyak perbaikan.

"Kalau ditinjau dari potensi alam Sulawesi Barat, cukup bagus untuk wisata dan banyaknya hasil alam, maka kapal jadi moda transportasi yang dibutuhkan, karena itu perlu segera mungkin diperbaiki," ungkap Muhidin.

Menurut politisi Golkar ini, kondisi pelabuhan ini masih banyak yang harus diperbaiki, "Pelabuhan Belang-belang ini masih sangat terbatas kelengkapannya karena memang pelabuhan belum masuk kedalam golongan komersial karena masih dipegang oleh Unit Pelaksana Kerja (UPT) dari Kementerian Perhubungan", jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari temuan ini Komisi V akan menindaklanjuti dengan Kementerian Perhubungan saat rapat kerja nanti. "Nanti saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan yang baru ini akan kami komunikasikan bagaimana pelabuhan ini bisa ditingkatkan dan dioptimalkan karena hal ini menyangkut visi Presiden kita yaitu perkembangan tol laut," tuturnya.

Hal itu lanjut Muhidin, merupakan kontribusi Komisi V dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan Pelabuhan Belang-belang di Sulawesi Barat.

Dalam kunker reses kali ini ikut serta Rendy M.A Lamadjido (PDIP), Hamka B. Kady (PG), Andi Iwan (Gerindra),



Tim Kunker Komisi V DPR RI mengunjungi Pelabuhan Belang-belang di Sulbar

Novita Wijayanti (Gerindra), Umar Aرسال (PD), Willièm Wandik (PD), Hanna Gayatri dan Sungkono (PAN), Neng Eem Marhamah (PKB), Sigit Sosiantomo (PKS), Nurhayati (PPP) dan Fauzih Amro (Hanura). ■

(guy.rip). Foto: Jiyadi/mr

Kurangi Kesenjangan, Sarpras IAIN Lampung Perlu Ditingkatkan

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung Jl Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Jumat (29/07).

Ketua Tim kunker Deding Ishak yang juga Wakil Ketua Komisi VIII mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi salah satunya di Lampung untuk meninjau perkembangan sarana prasarana yang ada di kampus dan juga menerima masukan.

Menurutnya sarana dan prasarana yang ada di kampus IAIN Lampung perlu ditingkatkan guna mengurangi kesenjangan yang terjadi antara perguruan tinggi yang ada di bawah Kementeristek dikti dengan Kementerian Agama.

"Perguruan tinggi di bawah Kementeristek dikti bisa lebih fokus untuk



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak

meningkatkan kualitas akademiknya, sedangkan perguruan tinggi yang ada di

bawah Kemenag harus disibukkan dengan urusan sarana dan prasarana selain juga memikirkan peningkatan kualitas akademik," tegasnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Deding mendesak Kementerian Agama harus berani melakukan terobosan konkrit seperti realokasi SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional).

"IAIN layak menjadi universitas unggulan di kalangan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) maupun seluruh universitas di Indonesia. Komisi VIII DPR RI akan berjuang untuk merealisasikan hal tersebut," imbuhnya.

Ia menambahkan, pendidikan Islam saat ini menjadi fokus pembahasan di Komisi VIII DPR RI. Hal tersebut dibuktikan melalui panja Pendidikan Islam

yang dibentuk. "Di Panja ini kami membuat salah satu kesimpulan yaitu mengusulkan agar adanya pemisahan Dirjen Pendidikan Islam Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi Islam di bawah kementerian Agama RI. Kami ingin PTKIN dan PTKIS tidak dibawah Dirjen Pendidikan Islam tetapi tersendiri,"ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mempertimbangkan usulan terkait

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas yaitu RUU Pengembangan Madrasah dan Pondok Pesantren dan juga RUU Pendidikan Tinggi Islam untuk diajukan sebagai UU usul inisiatif DPR RI.

Di tempat yang sama, Rektor IAIN Mohammad Murki menyambut baik kedatangan anggota Komisi VIII dalam acara Kunker reses masa sidang V. Dia mengharapkan, pengembangan kampus

IAIN Lampung memerlukan dukungan politik khususnya dari anggota Komisi VIII DPR RI.

Dalam Kunjungan ini ikut serta sejumlah anggota Komisi VIII di antaranya, Agus Susanto, Itet Tridjajati Sumarijanto, Hamka Haq, Erwin Moeslimin Singajuru, Linda Megawati, Asli Chaidir, Arzeti Bilbina Setiawan, An'im F Mahrus, Mohd. Iqbal dan Muslich. ■

(rmm, npi) Foto: Kua/jk

Komisi IX Kunjungi RS Bethesda Yogya Terkait Vaksin Palsu

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit (RS) Bethesda Yogyakarta, Selasa (2/8). Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri, M.Sc melalui kunjungan ini, DPR RI ingin cari gambaran tentang terkait indikasi dugaan laporan menjadi pemasok botol bekas untuk digunakan sebagai kemasan vaksin palsu.

Saat Tim kunker Komisi IX DPR RI berdialog dengan pihak Rumah Sakit (RS) Bethesda, pihak Manajemen Rumah Sakit (RS) Bethesda Jogja membantah menjadi pemasok botol bekas untuk digunakan sebagai kemasan vaksin palsu. Sebelumnya, nama RS Bethesda muncul dalam bagan penyedia atau pemasok botol bekas untuk mengemas vaksin palsu sesuai diproduksi. Munculnya nama itu seiring pemaparan dalam bentuk bagan berisi 14 RS dan enam orang bidan yang terlibat dalam proses produksi vaksin palsu yang dirilis kepolisian dan kementerian kesehatan.

Tim Kunker Komisi IX DPR RI diterima langsung Direktur RS Bethesda Dr.R. Gatot Titus Wiratsongko, dalam pertemuan tersebut Pihak RS Bethesda mengatakan bahwa ada pemeriksaan dari kepolisian dan ada oknum dari RS tersebut yang terlibat. Selain itu, Gatot Titus Wratsongko mengungkapkan pengelolaan kemasan bekas vaksin sebagai limbah medis dilakukan sesuai standar prosedur operasional (SPO) khusus dan sesuai undang-undang.

"Kalau terbukti pihak ketiga memberikan peluang terhadap oknum, atau terlibat dalam pemasokan botol bekas untuk kemasan vaksin palsu, maka akan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri

kami evaluasi. Tindakan itu berarti sebuah pelanggaran kesepakatan," ujarnya kepada anggota Komisi IX DPR RI.

Pengelolaan limbah medis diawali dengan mengumpulkan limbah di sebuah tempat khusus untuk mengumpulkan limbah medis, lalu ada proses pembersihan, termasuk membersihkan label kemasan. Setelah itu, limbah itu diolah oleh pihak ketiga yang telah menjalin kerja sama dengan SPO yang

sudah disepakati dalam nota kesepakatan. Dalam pengelolaan limbah, meskipun sudah diserahkan kepada pihak ketiga, RS Bethesda tetap melakukan pengawasan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Dr. Karolin Margret Natasa meminta untuk mengevaluasi kembali terhadap pengelolaan limbah rumah sakit dan penggunaan vaksin palsu, agar tidak terulang kasus - kasus yang serupa, sehingga tidak ada yang di rugikan.

Hal yang sama ditambahkan Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri, jangan sampai yang selalu disalahkan adalah oknum, harus ada model

perubahan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pengelolaan limbah rumah sakit.

Tim Komisi IX DPR RI melanjutkan kunjungan ke gedung baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta. Hal yang dikeluhkan BPOM Yogyakarta dalam melakukan pengawasan obat dan makanan adalah kurangnya *sample* pembandingan dan sumberdaya manusia yang terbatas. ■

(andri, npi) foto : Andri/nm

Ketua Komisi V DPR RI Gelar Bedah Buku "Duc In Altum"

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menggelar acara bedah buku bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Eko Putro Sandjojo, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani dan Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7).

A cara diskusi buku "Duc In Altum" atau yang bermakna "Bertolaklah ke Tempat yang Lebih Dalam" ini merupakan kumpulan cerita kegiatan reses Fary bersama konstituennya di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Secara khusus buku ini berisi laporan kegiatan reses saya di NTT. Semoga bisa menjadi inspirasi sehingga peran kita sebagai anggota DPR RI untuk menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa tersampaikan dan terwujud," ungkap Politisi Fraksi Gerindra itu.

Dalam acara yang dipandu moderator Ansel Alaman ini, Menteri PDT Eko Putro secara pribadi mengapresiasi buku karya Fary tersebut. Ia menilai, rekam jejak Ketua Komisi V itu tidak perlu diragukan lagi.

"Merah putihnya luar biasa, tidak hanya kepentingan partai tapi juga kepentingan desa. Tadi kita sudah lihat bagaimana Pak Fary sangat *hands on*, turun ke bawah membantu mencairkan hal-hal



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis usai acara bedah buku *Duc In Altum*

yang tidak terkomunikasikan dengan baik antara desa dan pusat," ucap menteri yang baru saja dilantik presiden ini.

Selain itu, rekan pimpinannya di Komisi V, Michael Wattimena memberikan tanggapan positifnya. Menurutnya, buku itu belum mencakup keseluruhan rekam jejak Fary selama memimpin Komisi V. Buku ini bukan

hanya menceritakan perjalanan saat reses, tetapi juga menyajikan realitas empiris yang ditemui di daerah kepulauan.

"Sebelum membaca buku, saya menangkap mungkin ini merupakan bagian yang terkecil daripada perjalanan Bung Fary selama dua periode. Bagi saya ini belum cukup kalau

mengikuti rekam jejak Ketua. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini, bisa kita teladani bersama." ungkap Michael.

Dalam kesempatan tersebut, Fary berharap dengan adanya karya tersebut tidak hanya berguna untuk kepentingan rekan sejawatnya di DPR RI, Mitra Komisi V tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. ■

(amr.sc) Foto: Iwan/jk

Komisi V Pantau Kepastian Pembangunan Bandara Kertajati

Untuk memastikan kesiapan pembangunan Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka, Komisi V DPR RI mengirim Tim Kunjungan Kerja ke lokasi. Salah satu anggota Tim Kunker Yoseph Umarhadi menuturkan, kunjungan kerja Komisi V ke Bandara Kertajati untuk memastikan bahwa dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI sudah bulat untuk menyelesaikan pembangunan bandara ini.

Pembangunan pun mulai dilakukan pada tahun 2010 dan pemerintah sudah mengizinkan bahwa pembangunan bandara ini diperuntukkan dan menjadi induk bandara udara di Jawa Barat.

"Kita harus selesaikan bandara udara ini karena penerbangan di Indonesia ini sudah sangat padat terutama di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Nanti kita akan alihkan penerbangan ke Bandara Kertajati untuk mengurangi kepadatan di Bandara Husein Sastranegara," jelasnya.

Anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan untuk pembangunan *airside* (kawasan bandara) ini membutuhkan dana sekitar Rp 1,3 triliun dan pemerintah sudah menginvestasikan sekitar Rp 600 milliar sehingga masih kurang Rp 700 miliar. Presiden Joko Widodo saat lalu mengunjungi bandara udara Kertajati ini menginginkan penyelesaian segera di

Komisi IX Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Sumut

Tim Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara dan dalam acara ini berkesempatan mendatangi dan memantau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan.

Setelah menyambangi langsung, Ketua Tim Kunker Saleh Partaonan Daulay menilai pelayanan BPJS Ketenagakerjaan cukup bagus. Penilaian itu berdasar pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat yang sedang menunggu pelayanan.

Ketenagakerjaan itu pelayanannya lumayan bagus, karena ada beberapa masyarakat yang kita tanya, mereka menganggap memang prosesnya sudah sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah," papar Saleh di Medan, Selasa (2/8).

Saleh menuturkan, maksud Tim kunjungan kerja Komisi IX ini dalam rangka mengontrol secara langsung



Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau Kantor BPJS Ketenagakerjaan terkait pelayanan di Medan

bagaimana kesiapan BPJS dalam memberikan layanan, serta pendataan yang ada dalam BPJS. Menurut Saleh, kunker reses merupakan tugas utama dalam menyerap aspirasi.

"Dalam konteks pengawasan,

kunker reses merupakan tugas utama DPR RI dalam mendengar aspirasi," ungkapnya.

Dalam kunker ke Provinsi Sumut ini, ada 11 Anggota Komisi IX DPR RI yang melakukan tugas pengawasannya yakni Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay (F-PAN), Daniel Lumbang Tobing (F-PDI Perjuangan), dari F-Golkar John Kenedy Aziz dan Andi Fauziah Pujiwati Hatta, dari F-Gerindra Khaidir,

dari F-Demokrat Aliyah Mustika Ilham dan Verna Gladies Merry Inkiriwang, dari F-PKB Marwan Dasopang, dari F-PPP Muhammad Iqbal, dari F-Nasdem Amelia Angraini, dan dari F-PKS Ahmad Zainudin. ■

selesaikan di tahun 2018.

"Semoga saja pemerintah cepat merealisasikan anggaran untuk bandara ini baik di airside maupun *line side*," harap Yoseph menambahkan.

Ia juga mengapresiasi infrastruktur jalan yang menuju Bandara Kertajati sudah siap tidak ada masalah yang berarti. tinggal nanti *finishing* saja. Sarana jalan itu merupakan akses penghubung yang sangat penting. ■



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Bandara Kertajati

Pemprov Maluku Diminta Tetapkan Dayung Sebagai Cabor Prioritas

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Maluku memiliki atlet-atlet olah raga dayung yang berprestasi di kancah Nasional maupun Internasional, dengan menyabet emas ASEAN Games. Untuk itu, sebaiknya dengan dana APBD yang juga terbatas, lebih baik Pemprov Maluku menetapkan Cabang Olahraga Dayung menjadi prioritas.

“ Karena banyaknya prestasi, dayung perlu penanganan khusus, secara geografis Maluku memang cocok sekali untuk cabang olahraga ini. Maka, Prov Maluku bisa menjadikan sebagai olahraga andalan. Kami sudah sampaikan kepada Kemenpora, Pemda dan KONI Maluku, segera menetapkan cabang olahraga dayung menjadi cabang olahraga prioritas,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat meninjau PPLP Dayung di Maluku, Minggu (31/7).

Menurut Ferdi, dalam mengembangkan cabang olahraga dayung ini, perlu sinergitas dan koordinasi yang lebih mendalam dan cepat, antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pembagian tugas. Dia juga meminta kepada Pembina olahraga dayung agar tidak semua nomor cabang olahraga diambil, fokus kepada kemampuan atlet yang kiranya bisa menghasilkan prestasi. “Ke depan seharusnya pembinaan



Tim Kunker Komisi X DPR RI berfoto bersama sejumlah atlet dayung

prestasi bukan hanya kepada atlet, tapi Pembina dan pelatih juga perlu diperhatikan. Jadi bukan selalu sarana dan prasarannya saja. Kepada atlet yang berprestasi semestinya mendapat beasiswa,” ujar Poltisi F-Golkar ini.

Ferdi juga menyayangkan belum terkonsentrasinya bantuan yang diberikan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Belum lagi status tanah yang menjadi

tempat PPLP Maluku belum jelas, jika dilihat gudang tempat penyimpanan perahu kano juga sudah tidak layak.

Sementara itu, Deputi Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta mengatakan, Kemenpora dalam waktu dekat belum bisa

membantu dana yang terkonsentrasi pada cabang olahraga dayung ini. Apalagi dengan peralatan yang ada saat ini baru bisa menjangkau tingkat nasional, tetapi untuk Asean Games masih bisa. Jika sekelas ajang Olimpiade memang membutuhkan dana besar.

“Ke depan Kemenpora sudah menargetkan pembangunan bantu Sekolah olahraga seperti Ragunan Jakarta di semua Provinsi dan akan memberikan beasiswa kepada atlet yang berprestasi,” terangnya.

Selain itu, Pengurus PODSI Maluku Annos Iarmias mengharapkan, program beasiswa untuk atlet berprestasi segera direalisasikan, agar para pemuda di Maluku ini lebih tertarik pada cabang olahraga dayung. Karena sebenarnya olahraga dayung ini belum populer, mereka masih berpikir masa depan atlet belum jelas. ■

(ik.mpl) foto: Jaka/mr.

Komisi IV Kritisi Kekurangan Bayar Pemerintah ke Produsen Pupuk

Komisi IV DPR RI mengkritisi kekurangan bayar pemerintah ke produsen pupuk, termasuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Hal tersebut terungkap saat Komisi IV DPR RI meninjau Gudang PT PIM di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, Senin (1/8).



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Gudang PT PIM di Banda Aceh

“ Kedatangan kami ke Banda Aceh ini salah satunya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kepada Mitra kerja kami. Dan setelah kami melihat dan mendengar langsung dari pihak PIM kami mendapati

bahwa ada kekurangan bayar dari pemerintah ke para produsen pupuk, termasuk PT PIM, yang totalnya sekitar 2 Triliun rupiah,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI, Edhie Prabowo.

Padahal, lanjut Edhie, dana atau pembayaran itu sangat berguna untuk para produsen pupuk, terutama untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat

segera melunasi kekurangan bayar tersebut. Salah satunya dengan memasukkannya dalam APBN mendatang.

"Sebelumnya para produsen pupuk, termasuk PT PIM kondisinya seperti mati suri. Namun belakangan sudah mulai bangkit dan bergerak. Tentunya kondisi yang menggembirakan ini harus terus didukung dan didorong, salah satunya melalui kebijakan anggaran.

Kami berharap kekurangan bayar itu dapat segera diatasi, bahkan jika memungkinkan mendapat tambahan anggaran," ujar politisi dari fraksi partai Gerinda ini.

Sementara itu Direktur Utama PT PIM, Achmad Fadhiel menjelaskan bahwa kekurangan bayar tersebut terdiri dari kekurangan bayar pada tahun 2014 sebesar 1.13 Triliun dan pada tahun 2015 sebesar 443 Miliar, sementara 500

Miliar merupakan kekurangan pada tahun berjalan.

Dalam kunjungan tersebut ikut serta Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi, anggota Komisi IV lainnya seperti Delia Pratiwi Sitepu, Azhar Romli, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Darori Wonodipuro, Oo Sutisna, Eko Hendro Purnomo, Ibnu Multazam, Hermanto, Dardiansyah dan Hamdani. ■

(dny) Foto: Aym/mr

DPR RI Dorong Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalbar

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendorong PT Pelindo II untuk segera merealisasikan pembangunan pelabuhan samudera di Pantai Kijing, Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Hal ini diperlukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk membantu Pelindo II mengembangkan pelabuhan laut di Kijing karena Pelabuhan Pontianak sudah tidak memadai lagi untuk menampung kebutuhan aktivitas perdagangan.

"Pelabuhan ini sudah tidak bisa lagi dikembangkan, hanya bisa dilakukan efisiensi dengan modernisasi peralatan yang ada," ungkap Lasarus saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (1/8).

Selain itu, lanjut Lasarus, salah satu masalah yang dihadapi pelabuhan tersebut adalah kuatnya sedimentasi di sepanjang alur sungai Kapuas. Akibatnya, akses transportasi kapal semakin sulit karena tergantung pada pasang surut air laut.

"Kami mendorong Pelindo cepat mencari solusi, supaya pelabuhan baru yang nanti bisa masuk kapal besar. Tidak seperti sekarang, tunggu jannya dulu baru bisa sandar. Dalam kota Pontianak juga sudah mulai macet, nah begitu peti kemas pindah kesana (Kijing), maka dengan sendirinya seluruh aktivitas terkait peti kemas ini akan keluar dari kota dan tidak mengganggu arus



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalbar

transportasi masyarakat dalam kota Pontianak," jelas Lasarus.

Dalam pertemuannya dengan PT Pelindo II tersebut, hal senada disampaikan anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem) bahwa masalah pelabuhan ini sangat vital karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Kalbar.

Selama ini untuk mengeksport salah satu komoditas utama Kalbar yaitu Crude Palm Oil (CPO), pengiriman harus melalui pelabuhan tetangga seperti Belawan sehingga pemerintah setempat tidak mendapatkan pajak dari kegiatan ekspor tersebut. "Sampai saat ini kita

tidak dapatkan devisa karena kita ekspor CPO dari pelabuhan lain," tegasnya.

"Makanya kita minta apa yang menjadi hambatan, untuk mempermudah dan mempercepat sehingga pembangunan pelabuhan laut di Kijing segera terealisasi pada tahun 2020," imbuh politisi dari dapil Kalimantan Barat itu.

Nantinya, Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat sehingga ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan tersebut. ■

(anna.mp) Foto: Annu/mr

Komisi X Temukan Perbedaan Data Jumlah Guru dan Siswa di Kaltara

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Hanura (F-Hanura) Dadang Rusdiana mengatakan masih ada masalah terkait pemerataan keberadaan guru di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ada perbedaan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam neraca pendidikan di Provinsi Kaltara terkait rasio guru dengan jumlah siswa.

“Berdasarkan rilis dari Kemendikbud dalam neraca pendidikan di Kalimantan Utara, rasio guru dengan siswa sudah memadai, jadi satu guru berbanding 15, itu sudah sangat ideal, tetapi ternyata berdasarkan informasi dari gubernur, tidak seperti itu, bahkan gubernur menyampaikan sekitar lima ribu mereka kekurangan guru, sehingga tentunya harus dikonfirmasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan,” kata Dadang Rusdiana kepada Parlemen usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie

dan jajaran SKPD Pemprov Kaltara, Senin, (1/8).

Politisi dari Partai Hanura itu melihat ada problem yang cukup serius terkait soal pemerataan guru, terlebih Tarakan sebagai ibukota Provinsi Kaltara wilayahnya banyak yang berjauhan satu sama lain sehingga bukan hanya rasio guru dengan jumlah siswanya saja, tetapi persoalan kebijakan yang menyangkut pemerataan guru yang harusnya sudah terdata dengan baik dalam data pokok pendidikan maupun neraca pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Ini baru satu aspek mengenai rasio kecukupan guru, belum mengenai infrastruktur berapa ruang kelas yang baik, rusak sedang, rusak ringan, rusak berat. Ini kan harus kita pelajari lebih lanjut, sehingga ke depannya tentu bisa lebih baik," ujarnya.



Tim Kunker Komisi X DPR RI berfoto bersama para siswa di Kaltara

Khusus untuk Provinsi Kaltara, pihaknya mendorong agar Provinsi ini memperbanyak sekolah-sekolah berasrama (*boarding school*). "Saya kira *boarding school* ini harus menjadi karakteristik daerah-daerah terjauh, terdepan dan dengan letak geografis seperti Kaltara ini," katanya.

Ia mencontohkan, bagaimana Malaysia di daerah perbatasannya dengan Thailand, mereka (Malaysia-red) memiliki universitas terkenal dengan konsep *boarding school*, dengan fasilitas yang sangat menunjang sehingga banyak orang Thailand yang kuliah di tempat tersebut.

Kemajuan sektor pendidikan ini tentunya harus sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa peran negara harus mendahulukan sektor pendidikan untuk daerah terluar,

tertinggal, terdepan, salah satunya adalah Provinsi Kaltara.

Kalau kita melihat, Kaltara ini masih banyak yang harus kita bangun, mulai dari aspek infrastruktur, karena ini daerah baru, tahun 2013 baru berdiri. Kaltara juga berbatasan dengan Malaysia, tentunya punya peran strategis, tentu ini adalah daya saing bangsa, sehingga kita harus memberi perhatian lebih kepada Kaltara ini," jelasnya.

Selain Dadang Rusdiana, kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltara yang dipimpin Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mujib Rohmat juga diikuti sejumlah Anggota Komisi X DPR RI Bambang Sutrisno (F-PG), Muslim (F-PD), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), Zainul Arifin Noor (F-PKB), Dony Ahmad Munir (F-PPP). ■

(su) Foto: Nisa/mr



Suasana pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan jajaran Pemprov dan Pemerintah tingkat II di Sumut

DPR RI Sesalkan UU Resi Gudang Belum Dilaksanakan Merata

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno ke Provinsi Sumatera Utara melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov dan Pemerintah tingkat II yaitu Bupati dan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di ruang pertemuan kantor Gubernur Sumatera Utara, di Kota Medan, Senin (1/8).

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor mengungkapkan bahwa daerahnya kesulitan dalam mengembangkan komoditas daerahnya "Ada dua permasalahan, daerah kami hampir 90% hidup dari pertanian yang terkendala permainan harga pasar serta pupuk yang mahal serta kemenyan yang tidak mengalami kemajuan dalam perdagangan, justru aset hutan kemenyan terus mengalami penebangan," kata Dosmar.

Dia menjelaskan bahwa di dunia hanya ada 3 negara penghasil kemenyan yang bagus, yaitu Indonesia di daerah Tapanuli Humbang Hasundutan, disusul Vietnam dan Yunani. Dan hingga saat ini belum ada langkah konkrit untuk meningkatkan komoditas-komoditas ini.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VI Irmadi Lubis mengingatkan bahwa sudah ada UU Resi Gudang dimana negara

dapat membangun gudang untuk para petani di daerah. "Jadi sistem Resi Gudang itu melindungi petani dari permainan harga, kalau harga sedang merosot dia tidak perlu jual, dimasukkan dalam gudang yang berstandar jaga kualitas panen dan petani mendapatkan Resi yang dapat ditukarkan di bank untuk mendapatkan modal," jelas politisi PDIP Dapil Sumatera I ini. Dengan demikian petani tidak perlu menjual pada pengijon atau berhutang pada rentenir.

Dia menyayangkan masih banyak kepala daerah yang tidak perhatian terhadap program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya. "Saya harapkan para kepala daerah di Sumatera Utara ini mengingat dan melaksanakan peraturan yang telah dibuat dan terprogram oleh negara, supaya bisa dikembangkan ke bawah. Bukan hanya menjadi kepala daerah penikmat kekuasaan," pungkasnya. ■

(ray) foto: Rizka/mr.

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany meninjau persiapan acara pidato kenegaraan 16 Agustus 2016, Jumat (29/7) foto : Runi

Kunjungan Kerja Komis IV DPR RI dipimpin Daniel Johan didampingi 17 orang anggota dewan meninjau pembibitan cengkih, pala, jagung dan Pelabuhan pelelangan ikan di Prov. Maluku Utara. Senin (1/4), foto : eka hindra/hr.



Tim Kunker Komisi VI DPR RI dipimpin Ketuanya Teguh Juwarno berdialog dengan penumpang Kapal PELNI KM Kelud rute Batam/Tanjung Balai Karimun - Belawan di Terminal Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara Selasa (2/8), foto : rizka/hr

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak menyalurkan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial saat kunjungan kerja ke Lampung, Jumat (29/7) foto : Ria/hr.

